

ABSTRAK

Hernita Silvia Silalahi. NIM 3123311017. Peran LSM Dalam Penyelenggaraan Perlindungan HAM Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: PKPA Medan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peran LSM PKPA dalam penyelenggaraan perlindungan HAM Anak di Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan di Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan yang beralamat di Jln. Abdul Hakim No.5 A Pasar I Setia Budi, Medan, Sumatera Utara. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan metode wawancara langsung kepada Yayasan PKPA Medan. Sumber data pada penelitian ini adalah manager kantor, untuk mendapatkan data yang lebih akurat dilakukan wawancara langsung dengan Ismail Marzuki sebagai koordinator informasi dan dokumentasi PKPA dan juga staf administrasi yaitu Vita Amalia Dalimunthe. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Yayasan PKPA Medan dalam menyelenggarakan perlindungan anak khususnya pada sanggar kreatifitas anak (SKA). PKPA memberikan layanan dan pendampingan khusus kepada kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Layanan yang diberikan dari PKPA emergency aid (PEA) berupa layanan kesehatan dasar dan mencarikan orang tua asuh anak atau panti asuhan bagi anak yang kehilangan orang tuanya. Layanan dari SKA yaitu mengembangkan program pencegahan perlindungan dan penggalian bakat-bakat yang dimiliki oleh anak jalanan dan anak miskin kota. pusat informasi kesehatan reproduksi dan gender (Pikir) memberikan layanan informasi dan remaja seputar kesehatan reproduksi, pemahaman tentang penyakit menular seksual (PMS). Pusat Pengaduan Anak (Puspa) memberikan pendampingan dan perlindungan bagi anak-anak untuk memperoleh akses terhadap keadilan, anak korban trafficking, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dana anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor yang mendukung PKPA dalam melaksanakan programnya adalah adanya kerja sama yang baik dengan lembaga dalam maupun luar negeri. Kemitraan ini akan memberikan kontribusi terhadap programnya. Faktor penghambat program PKPA adalah anak tidak memiliki minat yang dilaksanakan dan kurangnya kerjasama dengan orang tua.

***Kata kunci:* LSM, Anak, Hukum Perlindungan Anak**

ABSTRACT

Hernita SilviaSilalahi. NIM 3123311017. The role of NGOs in the Implementation of the Child Rights Protection according to Law No. 35 of 2014 on the Amendment of the Act No. 23 of 2002 on the Protection of Children (Case Study: PKPA Medan)

This study aims to determine the position and the role of NGOs in the implementation of human rights protection PKPA Children in North Sumatra. Research conducted at the Center for Child Protection Foundation (PKPA) Medan is located at Jln. Abdul Hakim 5 A Market Setia Budi, Medan, North Sumatra. The data collection techniques in this study conducted the interview method directly to the Foundation PKPA Medan. Sources of data in this study is the manager's office, to obtain more accurate data to do a live interview with Ismail Marzuki as coordinator PKPA information and documentation as well as administrative staff, namely Vita AmaliaDalimunthe. This research is a qualitative descriptive study.

The results showed that: The Role of Child Protection Studies Center Foundation (PKPA) Medan in organizing child protection was excellent. PKPA providing services and special assistance to the group of children who need special protection. Services provided from the PEA in the form of basic health care and children find foster parents or an orphanage for children who lost their parents. Service of SKA is to develop prevention programs and extracting protection talents possessed by street children and poor children of the city. Thought to provide information services and adolescent reproductive health, understanding of sexually transmitted diseases (STDs).Puspa provide assistance and protection for children to gain access to justice, child victims of trafficking, children who are victims of violence fund children in conflict with the law. Factors that support PKPA in implementing the programs is their good cooperation with domestic and foreign institutions. This partnership will contribute to the program. PKPA program inhibiting factor is the child does not have the interest held and the lack of cooperation with parents.

Key Word: *Non Government Organisation, Child , Child Protection Law*